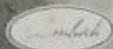


Menemukan Historiografi Indonesiasentris

JILID

1

Editor
Sri Margana
Retno Sekarningrum
Ahmad Faiso



MENEMUKAN HISTORIOGRAFI
INDONESIASENTRIS

Widyakarya 4-6. Des 2017
WEM. ~~Ad~~

~~Prof. Ketut Arbana~~

Pasal 11
Langkah Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

1. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a. pemberian Ciptaan; b. Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuk; c. penempatan Ciptaan; d. pengalihan; e. pengembangan; atau f. pendistribusian Ciptaan; g. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; h. Pertunjukan Ciptaan; i. Pengumpulan Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyediaan Ciptaan

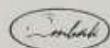
Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pemajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 114
Setiap Orang yang menyalahgunakan hak ekonomi dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengacuhkan pertimbangan penilaian dan/atau penggunaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikoloniannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**MENEMUKAN HISTORIOGRAFI
INDONESIASENTRIS**

Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2017

MENEMUKAN HISTORIOGRAFI INDONESIASENTRIS
Copyright © Perkumpulan Program Studi Sejarah se-Indonesia (PPSI),
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dan Departemen Sejarah UGM, 2017

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2017
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit OmbakTiga
website: www.penerbitombak.com

PO.782.12.'17

Editor: Sri Margana, Retno Sekarningrum dan Ahmad Faisol
Tata letak: Ridwan
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
MENEMUKAN HISTORIOGRAFI INDONESIASENTRIS

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017

xix + 825 hlm. : 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-258-477-3

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ~ ix

Pengantar Direktur Sejarah ~ xi

Pengantar Editor ~ xiv

Tinjauan Historiografis Penelitian Sejarah Revolusi Indonesia di Bali (Respons Pemuda terhadap Revolusi Indonesia di Bali) ~ 1

A.A Bagus Wirawan, A.A. Ayu Rai Wahyuni

Beyond the Historiography: Film Dokumenter Sejarah sebagai Alternatif Historiografi di Indonesia ~ 27

Aan Ratmanto

Kampung Riwayatmu Dulu: Diskursus Historiografi Kampung sebagai Kontra Hegemoni Sejarah Nasional Indonesia ~ 34

Adi Putra Surya Wardhana

Penyelamatan Arsip dalam Historiografi Nasional (Sebuah Kajian Didaktik) ~ 50

Agung Ismawarna

Narasi dalam Lagu Pop Daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur ~ 73

Ans. Prawati Yuliantari

Studi Kewilayahan dan Penulisan Sejarah Indonesia: Menimbang Ulang Penulisan Sejarah Pergerakan Nasional Awal Abad ke-20 ~ 88

Andi Achdian

Menjahit Laut Nusantara Memperkuat Keindonesiaan (Telaah Menguatnya Identitas NKRI dalam Sejarah Maritim) ~ 102

Andi Ima Kesuma

Historiografi Soto: Jejak Metodologis Sejarah Kosmopolitanisme Indonesia ~ 118

Ary Budiyanto

Nasionalisme Kerbau: Simbolisme Satwa dalam Pencarian Identitas Keindonesiaan ~ 145

Budi Gústaman

Menimbang Tradisi Lisan Dayak dalam Penulisan Sejarah Kalimantan ~ 158

Dana Listiana

Historiografi dan Identitas Ulu di Sumatera Selatan ~ 168

Dedi Irwanto

Makanan dalam Sejarah, Sejarah dalam Makanan: Mengolah Makanan sebagai sebuah Kajian Historiografi ~ 182

Fadly Rahman

- Selebritas Masa Lalu: Studi Kasus Penelitian Biografi Tan Tjeng Bok dan Karyanya ~ 196**
Fandy Hutari
- Dokter, Sejarah Kedokteran, dan Historiografi Kita ~ 204**
Gani A. Jaelani
- Sejarah dan Fakta Kekinian: Historiografi Wanita (*Jugun Ianfu*) Masa Pendudukan Jepang di Indonesia ~ 221**
Hany Nurpratiwi
- Kajian Tentang Sejarah Komunitas Tionghoa di Sulawesi Utara: Aspek Metodologi dan Pengalaman Lapangan ~ 229**
Hendri Gunawan
- Membayangkan Indonesia dari Kacamata Kriminal Gagaklodra 1932-1953 ~ 244**
Heri Kusuma Tarupay
- Menemukan Karakter Historiografi Umat Islam Indonesia ~ 267**
Himayatul Ittihadiyah
- Historiografi Komunisme dalam Sejarah Nasional: Bali, Jawa Timur dan Catatan Pinggiran dari *Mainstream* Historiografi Indonesia ~ 283**
I Ketut Ardhana
- Modernitas Perkotaan: Membayangkan Kota dan Tema Historiografi Perkotaan di Indonesia ~ 301**
Ilham Daeng Makkelo
- Film sebagai Alat Propaganda Rezim Penguasa ~ 322**
Ilmiawati Safitri
- Sumber Sejarah bagi Era Milenial: Pewarnaan Foto dan Meme Sejarah ~ 339**
Iman Zonatul Haeri
- Ulama dan Islam Indonesia: Perkembangan Kajian dan Kecenderungan Metodologi ~ 361**
Jajat Burhanudin
- Penulisan Sejarah Seni Rupa: Lukisan-lukisan Koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia ~ 396**
Mikke Susanto
- Historiografi yang Terlewatkan: Pemerintahan Peralihan di Yogyakarta 1 Mei 1949- 30 Juli 1949 ~ 416**
Murdiyah Winarti
- Mnemohistory dan Problem Historiografi di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kenangan Masa Perang Dunia II di Kendari ~ 424**
Nasihin
- Historiografi dan Pahlawan Nasional ~ 431**
Nina Herlina
- Narasi Nasionalisme dan Logika Oposisi Biner dalam Buku Teks Sejarah dari Orde Baru hingga Post-reformasi ~ 436**
Nur Fatah Abidin

- Mencari Ken Dedes: Sisi Lain Rekonstruksi Majapahit dalam Sejarah Nasional Indonesia ~ 461**
Panggah Ardiyansyah
- Keragaman Tafsir dalam Narasi Sejarah Pasar: Sebuah Peluang Mengembangkan Historiografi Tematis ~ 484**
Putri Agus Wijayati
- Historiografi Olahraga: Problematika dan Tantangan Penulisannya ~ 493**
R. N. Bayu Aji
- Berpisah untuk Bertemu: Hubungan Baru Ilmu Kearsipan dengan Ilmu Sejarah ~ 498**
Raistiwar Pratama
- Dari Nisan ke Informan: Penggunaan Sumber Alternatif dalam Penulisan Sejarah Indonesia ~ 508**
Ravando Lie dan FX Harsono
- Kajian Heuristik pada Novel Sejarah Pramoedya Ananta Toer ~ 516**
Rudy Gunawan
- Membaca Tutar Perempuan dalam Historiografi Sejarah Perempuan Indonesia ~ 529**
Siti Utami Dewi Ningrum
- Negara dan Pengelolaan Kemaritiman: Menggagas Historiografi Laut dalam Perspektif *Total History* ~ 544**
Subandi Rianto
- Pseudo-Babada di Banyumas dalam Arus Perkembangan Historiografi Tradisional Jawa ~ 555**
Sugeng Priyadi
- Space, Place, and History*: Studi Perbanditan di Polongbangkeng, Takalar, Sulawesi Selatan ~ 569**
Taufik Ahmad
- Perdagangan Merajut Persatuan di Kepulauan Nusantara ~ 594**
Tundjung
- Hagiografi dan Perkembangannya: Studi Hagiografi Sunan-sunan Penyebar Islam di Jawa Timur ~ 605**
Ulum Fasih
- Menemukan Indonesiasentris dalam Historiografi Bugis ~ 622**
Umar Muda
- Museum sebagai Historiografi dalam Pendidikan Kebhinnekaan Indonesia ~ 631**
Wahyu Suri Yani
- Pendekatan Transnasional dalam Sejarah Indonesia: Tinjauan, Batasan, dan Kesempatan ~ 646**
Wildan Sena Utama
- Lokalitas Budaya dan Globalitas Perbudakan Laut Hindia: Kritik dan Wacana Historiografi Perbudakan Indonesia ~ 663**
Yayum Kumai

- Historiografi Arsitektur Kesenjangan dalam Meneliti, Teori dan Praktik ~ 671**
Yuke Ardhiati
- Membaca Kembali Sejarah Industri Gula di Indonesia ~ 688**
Wasino
- Dua Setengah Abad Pencarian Sejarah Nasional dan 60 Tahun Penemuan Sejarah Nasional Indonesia ~ 697**
Dias Pradadimara
- Kajian tentang Sejarah Perkotaan di Indonesia Pada Masa Kolonial Sampai Awal Kemerdekaan ~ 709**
Purnawan Basundoro
- Penulisan Sejarah Lingkungan di Indonesia ~ 723**
Nawiyanto
- Penulisan Sejarah Indonesia dengan Pendekatan Perspektif Global/Regional ~ 739**
Linda Sunarti
- Historiografi Seni Pertunjukan Jawa: Perkembangan, Metodologi, dan Pemanfaatannya (Sebuah Kajian Awal) ~ 737**
Dhanang Respati Puguh
- Perkembangan dan Perluasan Tema dalam Historiografi Batavia ~ 778**
Bondan Kanumoyoso
- Militer dalam Historiografi Indonesia ~ 796**
Kusuma
- Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dari Sudut Pandang Berita Koran Berbahasa Belanda 1957-1958: Sebuah Kajian Historiografi ~ 810**
Abdul Hafiz

PENGANTAR PENERBIT

Pada 14-18 Desember 1957, bertempat di kampus Universitas Gadjah Mada, di Siti Hinggil Keraton Kesultanan Yogyakarta diadakan Seminar Sejarah (Indonesia) oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seminar sejarah yang diadakan empat hari itu diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Seminar sejarah ini baru pertama kali diadakan dalam atmosfer kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamkan dua belas tahun sebelumnya, 17 Agustus 1945. Seminar sejarah itu dimaksudkan sekadar untuk mengumpulkan pelbagai pendapat dan saran-saran sebagai bahan-bahan yang berharga untuk menyusun, di kemudian hari, sejarah nasional Indonesia yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Enam puluh tahun kemudian, pada 14-16 Desember 2017, di Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, diadakan suatu acara untuk memperingati enam puluh tahun seminar sejarah 1957, dengan tema "Sejarah untuk Kebhinnekaan dan Keindonesiaan: Refleksi 60 Tahun Seminar Sejarah Indonesia". Acara ini diselenggarakan atas inisiatif bersama dari Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia (PPSI) dan pengurus pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dengan mendapat dukungan dana dari Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PPSI dan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM serta didukung oleh Penerbit Ombak Yogyakarta. Rangkaian acara peringatan Seminar Sejarah Nasional tersebut diisi dengan beberapa sesi pemakalah. Kumpulan makalah tersebut kemudian dibukukan ke dalam empat jilid dengan mengangkat empat tema besar: Jilid 1 Historiografi; Jilid 2 Pluralisme dan Identitas; Jilid 3 Agama dan Negara, dan Jilid 4 Pendidikan Sejarah.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Panitia Peringatan 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional, khususnya kepada Dr. Sri Margana selaku Ketua Panitia, yang memberi kepercayaan kepada Penerbit Ombak untuk menerbitkan kumpulan tulisan seminar di atas. Selain itu, kami ingin menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam penerbitan ini. Waktu yang sangat terbatas untuk menerbitkan empat jilid buku dengan total 2300-an halaman, bukanlah waktu normal dalam proses penerbitan.

x Panitia Seminar Sejarah Nasional 2017

Kami berharap, dengan penerbitan prosiding ini bisa membantu pendokumentasian berbagai pemikiran kesejarahan yang berkembang di Tanah Air dan memberi kesempatan kepada pembaca untuk bertamasya ke masa silam, serta membukakan pintu bagi masa depan. Selamat membaca. Terima kasih.

PENGANTAR DIREKTUR SEJARAH PROSIDING PERINGATAN 60 TAHUN SEMINAR SEJARAH NASIONAL PERTAMA, 1957-2017

Enam puluh tahun lalu, tepat pada 14 Desember 1957, pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama para sejarawan, budayawan, guru, politisi dan masyarakat menggagas penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional I (SSN I) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penyelenggaraan SSN I dapat dikatakan sebagai kulminasi dalam pencarian dan perdebatan mengenai identitas nasional yang dimulai sejak 1950-an. Sebagai negara yang baru lepas dari cengkraman penjajah, Indonesia memerlukan narasi sejarah yang dituliskan melalui perspektif anak bangsa, bukan orang-orang yang datang. Kepustakaan sejarah Indonesia kala itu lebih banyak menekankan peranan orang-orang Eropa, sedangkan masyarakat Indonesia tidak lebih sebagai objek ekspansi. Oleh karena itu, masa ini menjadi titik tolak kesadaran sejarah Indonesia baru sekaligus menentukan visi penulisan sejarah bangsa dari yang sebelumnya bersifat neerlandosentrisme menjadi indonesiasentrisme. Seminar Sejarah Nasional I mengangkat beberapa tema penting yang meliputi filsafat sejarah nasional, periodisasi sejarah Indonesia dan pendidikan sejarah.

Seminar Sejarah I yang diselenggarakan pada 1957 merupakan penanda dan pembuka zaman baru historiografi, yang oleh Sartono Kartodirdjo disebut sebagai "mercusuar" yang menunjukkan arah pelayaran historiografi nasional. Pada 1970, diselenggarakan Seminar Sejarah Nasional II (SSN II) sebagai kelanjutan dari SSN I. Pada seminar ini isu-isu dalam SSN I masih menghangatkan perdebatan. Baru pada Seminar Sejarah Nasional III (SSN III) di Jakarta pada 1981 seminar berusaha menjawab tantangan ilmu sosial dalam pengkajian ilmu sejarah. Seminar ini mendorong perlunya aspek teoritik dan metodologis dalam penulisan sejarah. Selanjutnya selama berturut-turut Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan pada tahun 1985 dan 1990.

Selain merumuskan berbagai temuan baru dan memetakan kecenderungan pengkajian sejarah, penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional cukup berperan dalam mengairahkan pengkajian ilmu sejarah yang kemudian berdampak pada produksi karya sejarah anak bangsa. Sejak 1980 Direktorat Sejarah dan Nilai

Tradisional juga turut andil dalam pengakayaan historiografi nasional melalui peroyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Berbagai karya sejarah berupa biografi tokoh, sejarah perlawanan terhadap penjajah, sejarah lokal, sejarah organisasi dan peristiwa dihasilkan oleh lembaga ini.

Kesadaran masyarakat terhadap perkembangan ilmu sejarah kian meningkat dengan terselenggaranya berbagai seminar, loka karya, *workshop*, konferensi kesejarahan, baik yang diadakan secara swadaya oleh masyarakat maupun kerjasama dengan pemerintah. Misalnya, pada 2016, Pemerintah melalui Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) menyelenggarakan Konferensi Nasional Sejarah X di Jakarta. Konferensi tersebut mengusung tema "*Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Perspektif Sejarah*". Konferensi diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, baik dari dalam maupun luar negeri. Terselenggaranya kegiatan tersebut tidak lepas dari makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah dan terciptanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Pada 2017 dengan mengusung semangat Peringatan 60 (enam puluh) tahun Seminar Sejarah Nasional pertama, Perkumpulan Program-program studi (Prodi) Sejarah Seluruh Indonesia dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) bekerjasama dengan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Peringatan 60 tahun Seminar Sejarah Nasional Pertama, 1957-2017. Selain dalam rangka memperingati 60 tahun Seminar Sejarah Nasional Pertama, kegiatan ini bagian dari respon berbagai pertanyaan pokok dalam Sejarah Nasional Pertama dan respon berbagai permasalahan bangsa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Toleransi dan anti-pluralisme menjadi isu nasional yang menghangatkan telinga kita akhir-akhir ini. Oleh karena itu, ilmu sejarah harus hadir mengambil bagian dalam merespon pelbagai permasalahan dan tantangan bangsa. Terselenggaranya kegiatan ini juga bertujuan merumuskan bentuk pendidikan dan penulisan sejarah dalam bingkai kebinekaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum silaturahmi, pertukaran pengalaman dan ilmu pengetahuan dari pendidik dan peneliti sejarah.

Peringatan 60 tahun Seminar Sejarah Nasional Pertama, 1957-2017 mengusung tema "*Sejarah untuk Kebinekaan dan Ke-Indonesiaan: Refleksi 60 tahun Seminar Sejarah Nasional*". Empat subtema pokok diangkat dalam seminar ini, antara lain, (1) Menemukan Historiografi Indonesiasentris, (2) Pluralisme dan Identitas: Pengalaman dan Pandangan Berkebangsaan, (3) Agama dan Negara: Pergulatan Pemikiran dan Ketokohan serta (4) Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia. Kegiatan diisi oleh peserta pembicara undangan dan peserta pemakai umum yang berjumlah 165 peserta dan empat *keynote speaker*, yaitu Dr. Hilmar Farid, Ph.D, Prof. Dr. Bambang Purwanto, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., dan Dr. Muhamad Ali.

Kami mengapresiasi dan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Tidak hanya sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya ilmu sejarah dalam pembangunan nasional, namun juga bagian dari sinergitas yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Tidak sampai disitu, kegiatan ini adalah sarana untuk memetakan kecenderungan pengkajian ilmu sejarah belakangan ini dan kaitannya dengan arah pembangunan nasional. Kami berharap, prosiding yang berisikan kompilasi karya sejarah ini tidak berhenti pada karya cetak saja, namun lebih jauh dapat mendorong dan bersumbangsih dalam merespon dan menjawab berbagai isu nasional belakangan ini, utamanya dalam merumuskan sejarah Indonesia yang sarat akan nilai kebinekaan, dengan harapan terwujudnya Indonesia yang beragam, toleran dan berkemajuan.

Direktur Sejarah

Triana Wulandari

PENGANTAR EDITOR

Kampus Universitas Gadjah Mada di Siti Hinggil Kraton Kesultanan Yogyakarta menjadi saksi bisu dari perdebatan yang menarik antara Muhammad Yamin dan Soejatmoko tentang filsafat sejarah nasional. Perdebatan ini berlangsung dalam sebuah perhelatan akademik pertama dari para perintis historiografi Indonesia yang berlangsung 60 tahun yang lalu tepatnya pada 14–18 Desember 1957. Dalam hajatan akademis yang kemudian dikenal dengan Seminar Sejarah Nasional I ini Muhammad Yamin mempresentasikan butir-butir pemikiran filsafat sejarah nasional yang ia sebut dengan “Catur-Sila Khalduniah” yaitu empat dalil filsafat kesejarahan yang dirujuk dari seorang filosof sejarah besar Ibnu Khaldun. Pada saat yang sama, Soejatmoko memaparkan pemikiran sejarahnya yang diberinya judul “Mencintis Hari Depan”. Menurut Muhammad Yamin kajian sejarah modern Indonesia harus dilakukan pada kaedah ilmiah dan berjiwa nasionalistik yang hasilnya dapat berfungsi menumbuhkan kesadaran nasional. Namun menurut Soejatmoko, kajian seperti ini akan membawa sejarah pada subyektisme yang mengesampingkan kaidah-kaidah ilmiahnya.

Euforia nasionalisme memang masih sangat kental di masa itu khususnya kalangan nasionalis yang hendak melihat negara-bangsa yang baru 12 tahun diproklamkan itu dapat selamat sampai tujuan utama proklamasi itu sendiri. Seminar ini juga diselenggarakan pada saat isu-isu separatisme dan perpecahan politik di Indonesia masih dirasakan bersama-sama. Sehingga, pandangan dan pemikiran populis Muhammad Yamin ini mendapat dukungan yang luas di kalangan peserta seminar.

Persoalan tentang filsafat sejarah nasional memang menjadi agenda pertama dalam seminar sejarah pertama ini, dan perdebatan ini sebenarnya tidak pernah berakhir hingga kini. Sekalipun konsepsi filsafat sejarah yang nasionalistik terus dibawa bahkan cenderung menguat pada masa Orde Baru, namun di lingkup akademik konsep filsafat sejarah nasional ini terus dipertanyakan, apalagi dalam perjalanannya muncul kecenderungan ke arah mitologisasi sejarah. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Soejatmoko sejak awal ini rupanya terbukti dengan kecenderungan mitologisasi sejarah ini. Banyak peristiwa sejarah nasional yang dijadikan tonggak hari-hari bersejarah nasional yang landasan historisnya mulai

dipertanyakan. Sejarawan senior Taufik Abdullah dan juga Kuntowijoyo dalam beberapa karyanya banyak menyajikan persoalan mitologisasi sejarah ini.

Disadari bahwa memang tantangan-tantangan baru bagi bangsa ini telah muncul dengan adanya perubahan dalam ekonomi dan politik global, namun pada saat yang sama tantangan dan persoalan lama masih terus muncul kembali menghampiri bangsa ini. Saat sistem ekonomi dan politik global dunia berubah ke arah yang semakin dikendalikan oleh perkembangan teknologi dan informasi, isu-isu duniapun bergeser ke arah persoalan HAM, lingkungan, pangan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, persoalan klasik identitas etnis dan agama, keberagaman dan toleransi juga bangkit kembali. Oleh karena itu menjadi penting barangkali untuk memikirkan kembali perdebatan yang telah muncul sejak 60 tahun lalu antara Muhammad Yamin dan Soejatmoko pada arah mana sebenarnya penulisan sejarah Indonesia ke depan hendak diarahkan. Apakah pemupukan mitos-mitos nasionalisme ini masih perlu dilanjutkan ataukah kita harus mendekonstruksikan diri belajar berdamai pada sejarah bangsa sendiri, baik pengalaman yang buruk maupun yang baik untuk merintis hari depan bangsa seperti yang diinginkan Soejatmoko.

Tema utama kedua yang didiskusikan dalam seminar itu adalah tentang periodisasi sejarah Indonesia. Dua pembicara utama tampil dalam panel ini, yaitu Soekanto dan A. Sartono Kardodirdjo. Soekanto mengajukan pembabakan waktu dalam sejarah Indonesia berdasarkan konsepsi politik dan pergantian administrasi kekuasaan atau rejim. Sehingga yang muncul adalah periodisasi "Masa Pangkal Sejarah, Masa Kutai-Taruma, Masa Sriwijaya-Medang-Singasari, Masa Majapahit, Masa Kerajaan-kerajaan Islam, Masa Pemerintahan Asing dan Masa Republik Indonesia 1945". Sartono Kartodirdjo mengajukan konsep periodisasi sejarah Indonesia berdasarkan proses integrasi bangsa, sehingga yang muncul adalah babagan sbb: "Zaman Pra Sejarah, Zaman Kuna (Masa-masa Kerajaan Hindu-Buda), Zaman Baru (Masa-masa kerajaan-kerajaan Islam, perlawanan terhadap imperialism Barat, masa pergerakan nasional dan masa Republik Indonesia).

Perubahan dalam masyarakat memang tidak dapat dipenggal dalam hari, tanggal, bulan, maupun tahun, namun karena kaburnya batas-batas dalam perubahan sejarah itu, maka sejarawan perlu menetapkan periodisasi untuk memetakan fase perubahan dan perkembangan sejarah. Di sinilah letak periodisasi sejarah diperlukan. Pandangan yang positif dalam gerak sejarah ini memang hal umum yang diterima dalam historiografi setiap bangsa, sehingga pemikiran terhadap periodisasi dalam sejarah ini menjadi penting. Pada praktiknya usulan Soekanto lebih mendominasi dalam pembabagan sejarah di Indonesia, sehingga perkembangan sejarah Indonesia terksesan sangat politis. Bahkan seorang mahasiswa doktoral sekalipun ketika mengaji sejarah sosial, seni dan pertunjukkan pun masih sering menggunakan kategori politik sebagai penggalan temporalnya. Sehingga kesan umum dari pelajar yang membaca buku sejarah Indonesia, Sejarah

Indonesia tidak lain adalah sejarah tentang pergantian rejim. Sejarah seperti ini melahirkan tokoh-tokoh sejarah Indonesia dari para pelaku politik, seperti politisi dan pemimpin perang, yang kemudian beramai-ramai diajukan sebagai pahlawan nasional. Sangat sedikit pelajar Indonesia mengenal tokoh-tokoh sejarah penting dari kalangan penemu (ilmuwan), filosof, ataupun sastrawan seperti yang kita pelajari dalam historiografi Barat.

Tampak di sini bahwa periodisasi yang didasarkan pada konsepsi politik dan pergantian rezim akan mereduksi kekayaan tematik dalam sejarah Indonesia dan mebatasi pemahaman bangsa tentang capaian-capaian besar diberbagai bidang yang pernah diraih bangsa ini. Tema ini memang tidak secara spesifik dibicarakan dalam memperingati 60 tahun Seminar Sejarah Nasional I ini, namun sengaja menampilkan makalah-makalah dengan berbagai tema historiografi yang cukup luas. Dari keragaman tema historiografi yang diangkat dalam seminar ini tentu menjadi titik tolak penting ke depan untuk memikirkan ulang Periodisasi Sejarah Nasional yang lebih dapat mengakomodasi keragaman tematik ini.

Setelah 12 tahun merdeka, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki sejarah nasionalnya sendiri. Sehingga, pertanyaan tentang perlunya Sejarah Nasional dan syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan Sejarah Nasional menjadi agenda penting lain yang dibicarakan dalam Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957 itu. Rupanya hal ini bukan persoalan yang mudah untuk diwujudkan, karena 13 tahun kemudian dalam Seminar Sejarah Nasional II yang juga diselenggarakan di UGM Yogyakarta, persoalan ini kembali dibahas secara serius. Lima tahun kemudian, pada tahun 1975, buku yang diharapkan muncul dalam enam jilid. Dengan kata lain, butuh 30 tahun setelah bangsa ini merdeka keinginan memiliki buku babon sejarah Nasional itu dapat diwujudkan. Kita mengetahui juga bahwa sejak masa-masa akhir rejim Orde Baru, kredibilitas buku ini menjadi pertanyaan besar bagi para sejarawan Indonesia generasi baru dan munculnya IDAS (Indonesia Dalam Arus Sejarah), sebagaian dari tuntutan atas perlunya revisi dan penambahan substansi sejarah Nasional Indonesia yang ditulis 47 tahun yang lalu itu dapat dipenuhi.

Agenda penting ke-empat yang dibicarakan pada Seminar Sejarah Nasional I 1957 adalah tentang "pengajaran" sejarah Indonesia di sekolah-sekolah. Persoalan bertumpu pada materi pengajaran, jenjang dan tentunya buku-buku pelajaran sejarah yang masih sangat minim dan masih didominasi oleh buku pelajaran yang ditulis oleh para-penulis Belanda dan berbahasa Belanda. Dari tema ini tampak bahwa sejak awal telah disadari bahwa pengajaran sejarah tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kebutuhan nasional terhadap sejarah sebagai dasar bagi membangun "good citizenship" yang ditandai dari lekatnya nilai-nilai nasionalisme pada setiap individu bangsa. Pada prosiding ini permasalahan "pengajaran" atau sekarang lebih cenderung menggunakan istilah "pendidikan" telah bergerak dari permasalahan

klasik 60 tahun yang lalu, dari minimnya literatur ke arah metode pembelajaran dan perangkatnya yang tepat bagi setiap jenjang pelajar. Para pendidik sejarah telah banyak melakukan berbagai eksperimen atau praktek pembelajaran sejarah yang dapat mengikuti perkembangan teknologi dan juga cara pandang generasi milineal terhadap sejarah.

Satu permasalahan lain yang penting dibicarakan dalam seminar sejarah nasional I di tahun 1957 itu adalah pendidikan sejarawan. Dari sekian banyak pembicara yang menyajikan makalahnya dalam seminar itu barangkali hanya Sartono Kartodirdjo yang kemudian dikenal menjadi sejarawan besar, dan barangkali ia satu di antara segelintir sejarawan yang memang secara akademik dididik sebagai sejarawan. Sisanya mereka ada yang ahli hukum, politik, arkeologi, filologi dan ilmu sosial humaniora lainnya. Jika kita tengok juga dalam usia program studi atau jurusan sejarah di UGM dan UI pada saat itu juga masih sangat muda. Bahkan mungkin lulusan mereka yang berhasil memperoleh gelar sarjana sejarah belum genap 10 jari. Tahun itu dapat dikatakan bahwa kita baru memiliki segelintir sejarawan yang jadi seperti Husain Djadjadiningrat yang menjadi doktor sejarah pertama dari Indonesia di Universitas Leiden. Oleh karena itu pendidikan sejarawan di Indonesia menjadi persoalan krusial yang perlu dibicarakan dalam seminar pertama ini. Tentu saja UGM dan UI menjadi tumpuannya pada masa itu, karena pada tahun itu hanya dua perguruan tinggi itu yang telah menyelenggarakan program studi Ilmu Sejarah. Dan rupanya 13 tahun kemudian pendidikan sejarawan ini mengalami perkembangan yang pesat, ketika pada Seminar Sejarah Nasional II yang diselenggarakan di UGM tahun 1970 mulai muncul generasi baru sejarawan muda Indonesia. Taufik Abdulah, Joko Sukiman, Djoko Suryo, Abdurahman Suryomiharjo, Ong Hokham dsb mulain muncul di perhelatan ini, baik sebagai pemateri maupun membantu mengorganisir seminar.

Perkembangan positif itu juga tampak dari terbentuknya asosiasi profesi sejarawan yang sekarang dikenal dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia disingkat MSI, dan terpilih sebagai ketuanya yang pertama pada saat itu A. Sartono Kartodirdjo. Sekarang setelah 60 tahun profesi sejarawan di Indonesia telah mengalami proliferasi yang luar biasa. Ratusan sejarawan Indonesia telah bergelar doktor, dan ribuan telah bergelar master dan ratusan ribu telah bergelar sarjana, baik lulusan perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Proliferasi ini menjadi potensi yang luar biasa yang dapat dijadikan sebagai motor pengembangan penelitian dan penulisan sejarah Indonesia. Pekerjaan rumah terbesar bagi MSI atau asosiasi Prodi Sejarah Indonesia (PPSI) dan juga asosiasi-asosiasi sejenis untuk bersama-sama melakukan pengumpulan *data base* dan pemetaan bersama perkembangan historiografi di Indonesia saat ini. Agenda lain yang layak dipikirkan ke depan adalah sejauh mana potensi yang dimiliki sejarawan Indonesia dan juga riset-riset yang telah dilakukan ini mampu memberi sumbangan besar bagi masa depan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Agenda terakhir dari Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957 yang penting juga untuk menjadi refleksi dalam memperingati 60 tahun perhelatan ini adalah mengenai preservasi sumber-sumber sejarah. Penelitian sejarah tanpa sumber primer mustahil didapatkan narasi dan penjelasan terhadap peristiwa sejarah yang ilmiah. Oleh karena usaha-usaha besar telah dilakukan saat itu, tidak hanya bagaimana sumber dapat diakses tetapi juga dibaca dan dipahami oleh para peneliti sejarah. Upaya penerbitan sumber-sumber sejarah kolonial oleh Arsip Nasional Indonesia, dari mulai *Memori van Overgave*, *Politiek Verslag* dan jenis-jenis sumber lainnya adalah tindak lanjut dari upaya mengatasi persoalan sumber-sumber sejarah kolonial. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesiapun juga melakukan hal serupa dengan menerjemahkan artikel-artikel sejanan tentang tema-tema tertentu dalam sejarah di Indonesia. Sayang bahwa upaya-upaya ini sudah lama berhenti sejak generasi baru sejarawan dan arsiparis menggantikan generasi sebelumnya. Para generasi baru sejarawan dan arsiparis tidak memiliki kemampuan dalam pemahaman sumber sejarah kolonial sebaik generasi sebelumnya.

Namun kini upaya-upaya baru telah dikakukan untuk membangkitkan kembali upaya mempermudah akses terhadap sumber sejarah, seperti dengan digitalisasi sumber-sumber kolonial dan sumber VOC dan membuat sumber-sumber ini dapat diakses secara online. Baru saja kita mendengar dua buah kegiatan luar biasa di bidang preservasi arsip selesai dilakukan di dua tempat yang berbeda. Kegiatan pertama adalah digitalisasi arsip-arsip VOC yang disimpan di *Nationaal Archief* di Den Haag dan yang kedua adalah digitalisasi arsip-arsip VOC di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang dilakukan bekerjasama dengan The Corts Foundation. Di National Archief Den Haag disimpan 1.200 meter arsip VOC semua telah terdigitalisasi sekalipun belum semua dapat online. Di ANRI sendiri memang memang masih tersisa beberapa bundel arsip VOC yang belum terdigitalisasi saat kerjasama dengan The Corts Foundation berakhir tahun ini, namun diharapkan sisanya dapat diselesaikan oleh ANRI sendiri. Dari Laporan Joan van Vollenhoven yang menjadi board di project ini 1.150.000 halaman arsip VOC telah digitalisasi dan 950.000 telah dapat diakses secara online.

Inisiatif penyelenggaraan Seminar dalam rangka memperingati hari sejarah 14 Desember dan 60 Tahun Kongres Sejarah I, atau yang kemudian justru dikenal dengan istilah seminar ini diselenggarakan atas inisiatif bersama dari Perkumpulan Prodi-Prodi Sejarah Seluruh Indonesia (PPSI) dan pengurus pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dengan mendapat dukungan dana dari Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PPSI dan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Pada awalnya seminar ini hanya ingin membatasi sampai 60 pemakalah dan diselenggarakan selama dua hari saja, namun karena minat terhadap seminar ini begitu besar maka seminar diperpanjang hingga tiga hari dengan menghadirkan 165 pemakalah. Sekalipun tidak semua pembicara

mengijinkan untuk memasukan makalah mereka dalam prosiding ini, namun sudah cukup tebal untuk menghadirkannya dalam empat tema prosiding yang berbeda.

Empat tema yang diusung dalam prosiding ini adalah: *Menemukan Historiografi Indonesiasentris; Pluralisme dan Identitas: Pengalaman dan Pandangan Berkebangsaan; Agama dan Negara: Pergulatan Pemikiran dan Ketokohan; serta Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia*. Pembagian tema ini didasarkan pada tema besar dari seminar ini yaitu "Sejarah Untuk Kebhinekaan dan Keindonesiaan: Refleksi 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional I 1957". Para sejarawan dan sejarawati muda dan senior tidak dipisahkan di sini. Mereka digabungkan dalam satu panel-panel tematis yang diharapkan dapat saling belajar dan memahami tentang cara mereka belajar dan memahami historiografi.

Sebagai editor prosiding sekaligus ketua panitia seminar ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Saudara M. Nursam yang telah bersedia untuk menerbitkan empat prosiding ini dalam bendera Penerbit Ombak, sekalipun waktu yang ada untuk menghimpun pekerjaan besar ini sangat sedikit. Kepada saudari Siti Utami Dewi Ningrum, Retno Sekarningrum, Abmi Handayani, Muhamad Faisol dan Baha' Uddin yang telah bersama-sama saya menyunting naskah prosiding ini saya ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada semua penulis makalah dan pembicara seminar ini yang telah mengijinkan makalah mereka dalam prosiding ini, semoga pemikiran-pemikiran yang cerdas dan jernih dari para penulis ini dapat menginspirasi penelitian dan penulisan sejarah Indonesia yang lebih baik dan dapat memberikan cerminan bagi pemecahan-pemecahan permasalahan sedang dihadapi.

Kepada para *keynote speakers*, Dr. Hilmar Farid, Dr. Muhamad Ali, Prof. Dr. Bambang Purwanto dan Prof. Dr. Hariyono, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Seminar ini tidak pernah dapat terselenggara tanpa bantuan dana dari pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud, PPSI, Departemen Sejarah FIB UGM, dan beberapa lembaga yang turut mensponsori kegiatan ini seperti UGM Press dan Penerbit Ombak. Oleh karena itu kepada para pemimpin lembaga-lembaga itu, Ibu Triyana Wulandari, Bapak Dhanang Respati Puguh, Ibu Wening Udhasmoro dan Bapak M. Nursam, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada para penerbit yang turut meramaikan seminar ini melalui penjualan buku-buku sejarah kami ucapkan terima kasih pula. Kami atas nama editor prosiding dan panitia seminar memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekuarangan dan kesalahan dalam penyuntingan prosiding ini. Selamat membaca!

Yogyakarta 2 Desember 2017

Sri Margana

HISTORIOGRAFI KOMUNISME DALAM SEJARAH NASIONAL:¹ BALI, JAWA TIMUR DAN CATATAN PINGGIRAN DARI MAINSTREAM HISTORIOGRAFI INDONESIA

I Ketut Ardhana²

- Abstrak

Hingga saat ini, masih banyak ketimpangan yang terjadi antara historiografi komunis dengan historiografi agama, dan historiografi nasionalis. Padahal banyak hal yang dapat dipelajari, ketika paham komunisme berkembang di Indonesia pada masa-masa awal pergerakan, dimana ketika di era penjajahan itu, paham komunisme itu mampu menentang dan melawan kekuasaan penjajah seperti pada masa kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1920s. Akan tetapi, ketika gerakan komunisme di bawah Partai Komunis Indonesia melawan eksistensi kekuasaan yang sah di zaman kemerdekaan Indonesia, gerakan komunis inipun akhirnya dilarang. Namun demikian, dalam dinamika sejarah Indonesia hingga saat ini, seringkali ideologi komunis yang sudah dilarang itu, sering dimunculkan kembali karena dipertimbangkan akan mampu menggoyahkan pemerintahan yang sah. Ini hendaknya dapat diantisipasi, karena pemunculan isu gerakan komunis untuk pertimbangan politik sesaat, hendaknya diwaspadai, karena dapat mendistorsi jalannya pemerintahan sebagaimana dapat dilihat pada masa reformasi sekarang ini.

¹ Makalah dipresentasikan pada Peringatan 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional 1957-2017, *Sejarah Untuk Kebhinekaan dan Keindonesiaan: Refleksi 60 Tahun Seminar Sejarah Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Penulis adalah Guru Besar Sejarah Asia, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Bali (MSI-Bali), dan Ketua Program Doktor (S3) Kajian Budaya pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Bali.

Para generasi muda tampaknya memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang hal ini, karena ketika kekuasaan Order Baru berkuasa secara sentralistik dan authoritarian selama lebih dari 32 tahun telah membungkam berbagai referensi tentang gerakan komunis di Indonesia. Oleh karena itu, betapa signifikannya membahas masalah komunisme di Indonesia dalam konteks dinamika lokal dan konektivitasnya dengan daerah lain seperti Jawa Timur misalnya --dimana pelaku-pelaku sejarahnya sudah semakin sedikit karena meninggal dunia--, sehingga dengan pembahasan ini paling tidak akan diperoleh pemahaman yang lebih baik dan seimbang antara historiografi komunis, historiografi agama, dan historiografi nasionalis sebagaimana yang pernah dipolakan seperti itu di masa lalu.

Terdapat beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini antara lain pertama: bagaimana dinamika historiografi nasional Indonesia dalam konteks pembahasan komunisme? Kedua, mengapa pembahasan masalah komunisme sangat terbatas di level sejarah lokal dan sejarah regional? Ketiga, Bagaimana hendaknya dapat disikapi fenomena sejarah seperti itu? sehingga kedepannya, jika isu komunisme diangkat kembali ke permukaan, hendaknya dapat disikapi dengan bijak dan arif tentang berbagai isu sekitar komunisme dalam dinamika sejarah Indonesia yang terjadi itu. Dan pada akhirnya, diupayakan untuk membahas berbagai riak-riak yang terjadi di level lokal dan dicoba dicari konektivitasnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan komparatif dalam dinamika sejarah Indonesia. Dengan pembahasan historiografi Komunisme dalam sejarah nasional ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang holistik dalam konteks dinamika sejarah Indonesia yang mengglobal.

Kata Kunci: historiografi komunisme, historiografi agama, historiografi nasionalis, Bali dan Jawa Timur.

Pendahuluan

Sampai saat ini, ketika kita memperingati pelaksanaan Seminar Sejarah Nasional I di kota ini, Yogyakarta yang diadakan pada tahun 1957 itu, kita menyadari akan betapa perlunya melakukan introspeksi terhadap dinamika sejarah yang sudah berlangsung 60 tahun itu. Jika kala itu, para sejarawan kita mempersoalkan salah satunya tentang historiografi kolonial versus historiografi nasional, yaitu antara penulisan sejarah kolonial yang berat sebelah karena tekanannya pada sejarah penjajahan dengan penulisan tentang sejarah Indonesia yang termarginalisasi atau dijajah, maka pertanyaan kita sekarang adalah apakah kita masih terjajah atau terhegemoni dengan suatu kekuasaan?

Tentu pertanyaan sekitar masalah ini dapat dilihat bagaimana misalnya berbagai kekuasaan di masa lalu yang dipolakan dengan ideologi agama, nasionalis, dan komunis muncul ke permukaan (Reid, 1974, cf. Larrain, 1979: 13), dimana memberikan dampak pada perkembangan tidak hanya di level nasional, tetapi juga di level lokal. Kalau pun dapat disetujui tentang polarisasi ini, tampaknya hal ini berpengaruh pada dinamika sejarah Indonesia tidak hanya pada masa lalu, tetapi

pada masa kini. Bagi kelompok agama, dimana dipresentasikan oleh partai-partai Islam seperti Masyumi sebagai partai Islam yang menonjol pada saat itu, yang kemudian dihegemoni oleh partai nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia, setelah Soekarno membubarkannya pada tahun 1960-an. Meskipun dibubarkannya, partai-partai yang bernafaskan masih muncul pada era-era selanjutnya di era Orde Baru. Situasi ini tidak menimbulkan suasana politik yang sama, karena dibandingkan dengan partai-partai yang berideologi Islam misalnya, tidak terjadi pada munculnya partai-partai yang bernafaskan agama lainnya seperti Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan sebagainya. Lebih-lebih terhadap partai atau paham Komunisme yang telah dilarang setelah berkuasanya Orde Baru. Namun demikian, bagaimana dapat dipahami tentang polarisasi yang pernah dibuat pada masa lalu itu, apakah masih relevan membahasnya di tengah-tengah kritikan akan peran sejarah nasional yang tidak luput dari kekurangannya?

Di sinilah dicoba dibahas tentang historiografi komunisme dalam sejarah nasional: Bali, Jawa Timur dan catatan pinggiran dari mainstream historiografi Indonesia. Pembahasan isu ini dianggap relevan dalam mengisi kekosongan atau celah-celah yang masih belum banyak dibahas sebagaimana terlihat dalam sejarah nasional Indonesia. Oleh karena itu, ketika muncul isu-isu ini pada akhir-akhir ini muncul pertanyaan bagaimana isu yang sudah dianggap "final" dan selesai itu masih dimunculkan sebagai isu yang dianggap dapat menggoyahkan pemerintahan yang sah. Tambahan pula munculnya tuduhan-tuduhan terhadap seseorang yang dianggap terlibat untuk menjatuhkan reputasi politiknya.

Banyak di antara kita, atau bahkan banyak yang belum lahir, ketika peristiwa gerakan komunis itu berlangsung, sehingga tidak memahami secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Di banyak daerah seperti Bali dan Jawa Timur misalnya ada beberapa hal yang perlu dipahami tidak hanya dalam bagaimana peristiwa itu berlangsung, tetapi juga dilihat konektifitasnya, sehingga kedua wilayah dianggap memiliki relasi yang dekat antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa kedua daerah memiliki intensitas yang sama, tetapi Bali misalnya mendapat pengaruh yang lebih berat akibat dari gerakan komunisme itu sendiri dibandingkan dengan apa yang terjadi di Jawa Timur. Masih muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan mengapa hal ini berlangsung begitu intens sebagai akibat gerakan politik yang berlangsung di pusat kekuasaan di Jakarta, akan tetapi Bali dan Jawa Timur dan beberapa lainnya untuk mengambil beberapa contoh sebagai daerah yang mendapat pengaruh yang begitu krusial dan massif.

Selain itu, dilihat dari aspek pelaku yang mengalami langsung peristiwa gerakan komunisme baik di tingkat lokal, maupun di tingkat regional dan internasional tampaknya semakin sedikit jumlahnya, karena ketika peristiwa itu berlangsung mereka yang dituduh sebagai pelaku dan simpatisannya berada di luar negeri dan tidak berani datang kembali ke Indonesia, yang penuh dengan resiko akan ditangkap atau

dibunuh. Sementara itu, informasi-informasi berharga tentang apa yang dialaminya tampaknya belum banyak direkam atau ditulis. Apabila masalah ini dibiarkan terlewat begitu saja, maka sangat disayangkan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman sejarah yang dimiliki yang tentu jika ditulis akan memberikan pemahaman yang lebih baik. Memahami peristiwa lokal ini yang jauh dari mainstream historiografi nasional semestinya sudah dilakukan, mengingat kekosongan yang masih terjadi ketika menulis sejarah Indonesia yang komprehensif. Dengan pengertian ini, generasi yang akan datang akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam mengantisipasi berbagai dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berlangsung, sehingga dengan antisipasi yang arif dan bijak, keutuhan Negara kesatuan Indonesia dapat terus dilakukan di masa kini dan masa yang akan datang.

Di sinilah pentingnya membahas isu-isu sekitar historiografi komunisme sehingga diharapkan akan dapat membangkitkan penulisan isu ini di wilayah-wilayah yang kejadiannya memberikan kontribusi pemahaman terhadap historiografi komunisme itu sendiri. Dalam makalah ini dibagi ke dalam tiga pembahasan yaitu pertama: dibahas historiografi komunisme dalam dinamika historiografi nasional Indonesia, kedua: historiografi komunisme dalam konteks lokal dan regional, ketiga: historiografi komunisme, fenomena sejarah dan *lesson learnt* dan keempat: Riak-riak sosial di tingkat lokal dan konektifitasnya: dinamika sejarah Indonesia. Dengan pembahasan isu-isu ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam historiografi Indonesia yang lebih utuh.

Historiografi Komunisme dalam Dinamika Historiografi Nasional Indonesia

Melalui penyelenggaraan seminar sejarah nasional yang diadakan pada tahun 1957, sebenarnya sudah dapat dipetakan tentang apa dan kemana arah perkembangan historiografi Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Dibandingkan dengan historiografi agama, maupun historiografi komunis, tampak historiografi nasional lebih dominan yang tampak memberikan kontribusi pada penguatan sejarah nasional Indonesia.

Bahkan, dengan kuatnya historiografi nasional sebagaimana muncul dalam bentuk buku *Sejarah Nasional Indonesia* yang editornya salah satunya Nugroho Notosusanto dan terdiri dari enam jilid yang memberikan peran penting tentang hadirnya paham nasionalisme jika dibandingkan dua paham lainnya seperti pembahasan tentang historiografi agama dan komunis itu sendiri. Kondisi ini mengarah pada di satu pihak memang menguatnya paham-paham nasionalisme di lingkaran kekuasaan, dimana diartikan ketika kesadaran individu itu diserahkan kepada paham kebangsaan, namun di pihak yang lainnya tampak peristiwa-peristiwa lokal tampaknya diabaikan atau belum banyak yang dilakukan. Padahal peristiwa lokal sekitar gerakan komunisme itu tidak hanya terjadi di Jawa,

Sumatra, dan Bali, tetapi juga di daerah-daerah lainnya seperti di Nusa Tenggara dan sebagainya (Ardhana, 2000 dan 2005).

Muncul pertanyaan, mengapa generasi sekarang khususnya yang belajar sejarah tidak terlalu memberikan perhatian pada isu-isu sekitar historiografi komunisme? Padahal isu tersebut termasuk dalam kategori penulisan sejarah kontemporer, dimana pelaku-pelakunya masih hidup yang masih ingat dengan pengalaman yang dialaminya. Dilihat dari referensi yang ada tampaknya sekarang ini mulai terjadi peluang yang semakin terbuka tentang penulisan sekitar sejarah yang dianggap gelap yang berkaitan dengan gerakan komunisme itu.

Dalam penulisan sejarah yang konvensional memang diartikan betapa pentingnya sumber-sumber kesejarahan yang harus dimiliki sebelum sebuah kisah sejarah ditulis. Kalau dikaitkan seperti sejarah politik masa lalu memang banyak yang sudah ditulis tentang biografinya. Seolah-olah tampak, bahwa jalannya sejarah suatu bangsa hanya ditentukan oleh kisah hidup tokoh-tokoh orang besar itu yang telah memenangkan konkurensi di pentas politik nasional. Namun demikian, bagaimana tentang peran "orang kecil" seperti seorang guru desa, petani miskin, penari desa yang tidak tahu menahu yang ikut menari karena diajak kelompok lain dalam sebuah perayaan misalnya, akan tetapi kemudian dituduh sebagai pelaku.

Apabila dilihat kisah sejarah yang diperankan oleh tokoh-tokoh orang besar (*the great man*) memang peran orang kecil masih sangat terbatas dilakukan dalam penulisan sejarah Indonesia. Ini disebabkan oleh terbatasnya bahan-bahan seperti sumber-sumber sejarah. Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah kalau tidak ada sumber sejarah, maka sejarah tidak ditulis? Memang ada diktum sejarah yang menyebutkan bahwa "*no document, no history*" sebagaimana diungkapkan oleh Leopold von Ranke, bahwa sejarah adalah "*was es eigentlich gewesen ist*" dimana terkandung sebuah pengertian, bahwa sejarah adalah apa yang sebenarnya terjadi, yang berdasarkan bahan-bahan dokumen tertulis.

Dengan demikian, tidak ada dokumen, maka tidak ada sejarah. Akan tetapi, dalam penulisan sejarah atau historiografi komunis terutama dalam kaitannya dengan para korban, tentu terbatas dalam kaitannya dengan sumber tertulis, dan dapat dimulai dengan masalah informasi atau sumber lisan. Berkaitan dengan sumber lisan ini tentu masih banyak tersebar di kalangan masyarakat di Jawa Timur dan Bali yang tampaknya banyak informasi yang belum digali. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permasalahan sejarah kontemporer dimana pelaku dan kisah yang diceritakan masih banyak diingat tokoh-tokoh besar dan orang kecil dalam sejarah, maka periode sejarah yang berkaitan dengan historiografi komunisme ini tampaknya segera perlu ditulis. Tidak hanya data-data tertulis yang ada, data-data yang tersirat hendaknya digali dalam melengkapi historiografi Indonesia.

Di masa lalu ketika Orde Baru berkuasa selama lebih dari 32 tahun tampaknya tidak banyak pelaku sejarah tentang gerakan komunisme itu. Adapun sebabnya adalah adanya sensitifitas materi yang akan disampaikan, sehingga pelaku sejarah enggan untuk diungkapkan. Perlakuan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap mereka itu, hingga kini masih membekas dan meninggalkan trauma yang sulit dilupakannya. Dapat dikatakan bahwa, ketika peristiwa komunisme berlangsung yang membekas tidak hanya di masa lalu saja, tetapi juga tentang kehidupan mereka di masa kini dan juga di masa yang akan datang?

Jumlah mereka yang diperlakukan seperti itu cukup banyak yang dalam makalah ini dibahas dengan peristiwa yang terjadi di Bali dan Jawa Timur. Rasa *ewuh pakewuh* ini memengaruhi sehingga menimbulkan kesulitan dalam penulisan sejarah komunisme itu. Kevakuman dalam penulisan historiografi komunisme setelah masa periode revolusi, khususnya tentang peristiwa tahun 1965, tampaknya tidak terlepas dari diskursus tentang masalah sensitifitas ini. Inilah salah satu penyebabnya mengapa tulisan tentang historiografi komunisme ini menjadi kurang diberikan perhatian, baik di kalangan sejarawan profesional, maupun dari kalangan sejarawan amatir.

Untuk itu, dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan ini dalam sejarah Indonesia, sejarawan tidaklah seharusnya menulis sebuah karya sejarah sepenuhnya tergantung pada sumber-sumber tertulis yang ada sebelumnya saja, tetapi berupaya mencari data-data lisan (*oral history*) yang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kebuntuan ini. Tidak hanya dalam konteks historiografi komunisme, tetapi dalam historiografi lainnya seperti dalam historiografi agama, historiografi nasional tampaknya pendekatan sejarah lisan ini menjadi penting untuk dilakukan. Ini dapat dimengerti, karena sumber lisan diharapkan para sejarawan lebih dekat dengan masyarakat daripada mereka melakukan kajian dengan kelompok-kelompok elit (Adam, 2000: xvii). Di samping itu, kalau hanya berbasis pada sumber-sumber tertulis bisa jadi tulisan-tulisan sebelumnya banyak dipengaruhi pemegang otoritas penguasa sebelumnya, sehingga apa yang dianggap sebagai hal yang dapat mengancam eksistensinya akan dicoba untuk diabaikan dalam penulisan-penulisan sejarah sebelumnya.

Untuk melengkapi informasi lisan yang sudah diperoleh tentu dapat dilihat kembali acuan-acuan yang sudah ada sebelumnya. Untuk latar belakang kolonial misalnya, dapat diperiksa karya yang ditulis oleh Petrus J. Th. Blumberger, (1931) dan karyanya yang lain yaitu, *Politieke Partijen en Stroomingen in Nederlandsch-Indie* (1934) yang fenomena saat itu dengan pelaksanaan pasal-pasal karet terhadap dinamika gerakan politik pada masa kolonial Belanda. Selanjutnya dapat dibandingkan dengan karya Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism* (1965) dan John Ingleson, *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial* (2004), demikian juga karya Bernhard Dahm,

Sukarno Kumpum Indonesiens Unabhangigkeit (1966) dan baca juga: Bernhard Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth Century* (1971).

Jika sumber tertulis seperti tersebut di atas sudah dibaca, maka informasi lisan berkaitan dengan isu-isu historiografi komunisme dapat dilanjutkan terutama di daerah-daerah yang secara intens pernah terjadi gerakan komunisnya. Paling tidak dalam skala historiografi nasional Indonesia misalnya muncul pertanyaan sejarah politik sekitar bagaimana sebuah gerakan komunis sebagai sebuah ideologi gerakan di era pergerakan nasional yang berlangsung dari tahun 1908 hingga 1945, telah menyebabkan adanya perubahan dalam pemberian arti atau makna terhadap gerakan komunis itu, terutama setelah masa pascarevolusi? Tentu, tidak semua pertanyaan itu berkaitan dengan sejarah politik. Terdapat juga wacana-wacana baru tentang penulisan periode pascarevolusi dalam kaitannya dengan nasib korban gerakan komunis yang gagal itu tampaknya memperoleh kesempatan juga untuk ditulis ketika kesadaran sejarah di kalangan sejarawan dan juga penguasa muncul untuk memiliki pandangan menyeluruh tentang kejadian tahun 1965 itu yang dianggapnya masih memiliki kekaburan dan kontroversi dalam interpretasi di sekitar peristiwa tahun 1965 itu.

Dibandingkan dengan karya-karya tentang buku mengenai historiografi nasional dan historiografi Islam, tampaknya buku tentang historiografi komunisme yang dikait-kaitkan dengan G 30 S seperti tampak pada masa era Orde Baru masih dilakukan secara terbatas. Tentu kita berharap, bahwa kekosongan ini tidak lama berlangsung, melainkan sudah dapat dimulai sehingga berbagai isu tentang komunisme dapat diberikan jawabannya, sehingga tidak menyesatkan kalangan generasi muda sekarang dan masa yang akan datang.

Di kalangan sejarawan Indonesia seperti Taufik Abdullah banyak menulis tentang historiografi nasional dan historiografi Islam. Akan tetapi, baru pada tahun 2012 ini, sejarawan Taufik Abdullah (Abdullah 2012a dan Abdullah, 2012b) menginisiasi penulisan sejarah yang berkaitan dengan gerakan tahun 1965 itu atau historiografi komunisme yang diangkat dalam dinamika sejarah Indonesia. Ini artinya Taufik Abdullah dkk berusaha tidak berat sebelah dalam memandang sejarah Indonesia yang bagaimanapun dinamika sejarah Indonesia itu sendiri diwarnai oleh gerakan agama, nasionalis, dan komunis. Selain itu, diantaranya di Indonesia hingga saat ini telah muncul beberapa tulisan yang pertama tentang masalah Gerakan 30 S ini adalah dengan penerbitan buku pada Desember 2012 dengan editor umum, Taufik Abdullah dan sejarawan Universitas Indonesia, A. B. Lopian yaitu, *Indonesia dalam Arus Sejarah*, dimana Aminuddin Kasdi pada bab 20 membahas Kudeta Gerakan 30 September (G 30 S) (Abdullah, 2012c).

Menarik untuk diungkapkan, bahwa dengan adanya kekosongan dalam kaitannya dengan historiografi komunisme terutama di era menjelang berakhirnya Orde Baru, muncul tuntutan akan perlunya penulisan sejarah total (*total history*).

Yang dimaksudkan adalah terpenuhi penulisan historiografi yang terbuka, tanpa ada ditutup-tutupi, sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya dan sejarawan (sejarawan profesional), peminat sejarah, sejarawan amatir, kalangan mahasiswa sejarah akan dapat memahami perjalanan sejarah bangsanya secara utuh. Sekitar tahun 1970-an dianggap sebagai sebuah langkah maju dalam historiografi Indonesia karena dimulainya dengan menyatakan, bahwa melukiskan secara seimbang pribadi Soekarno, Sjahrir, Amir Sjarifudin dan lain-lain sebagai timbulnya kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia (Onghokham, dalam Taufik Abdullah, 1978). Pengungkapan secara utuh bagaimana peran para elit dan orang kecil dalam sejarah Indonesia perlu dilakukan. Oleh karena itu, berikut dibahas bagaimana peran orang kecil yang jauh dari mainstream kekuasaan dicoba dikemukakan pada bagian berikutnya.

Historiografi Komunisme dalam Konteks Perspektif Internasional (Regional): Memori dari Russia

Karya historiografi komunisme yang dapat dipertimbangkan dalam konteks regional dan internasional ditulis oleh Peer Holm Jorgensen dalam bukunya yang berjudul, *The Missing History: Berdasarkan Kisah Nyata Dewa Soeradjana* dengan mempergunakan pendekatan sejarah lisan berupa wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana informan kuncinya adalah Dewa Soeradjana. Buku yang ditulis Peer Holm Jorgensen, misalnya mengakui, bahwa gerakan Partai Komunis Indonesia mempunyai peran juga dalam melakukan pembrontakkan pada penguasa kolonial Belanda pada tahun 1926 (2015: 62). Ini adalah kesamaan pandangan sebagaimana yang dikemukakan juga oleh penulis-penulis sejarah Indonesia oleh orang Indonesia sendiri dan penulis Barat lainnya.

Peer Holm Jorgensen, seorang pria kelahiran di Aars di Denmark pada tanggal 3 Maret 1946. Jorghensen seorang penulis novelis atau sastrawan, yang berupaya menulis kisah sebuah cerita dengan latar belakang sejarah dalam beberapa tulisannya. Karena sebagai sastrawan, tentu bukunya tampaknya tidak banyak menggunakan dokumen, tetapi lebih banyak menggunakan analisis sejarah berdasarkan kesaksian atau pengalaman seorang pelaku sejarah berdasarkan informasi lisan dari yang diwawancarainya.

Sementara itu, Dewa Soeradjana adalah pria kelahiran di Bali pada tanggal 12 Februari 1938. Ia pernah belajar di Ljubljana Slovenia dimana karena situasi politik di Indonesia menyebabkan ia tidak kembali pulang ke Indonesia. Dewa Soeradjana yang pada saat itu mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan tingginya di Eropa khususnya Eropa Timur. Dalam pemaparannya penulis mewawancarai Dewa Soeradjana yang awal kisah dimulai ketika ia mulai pengalamannya pada tanggal 21 Januari 1961 berangkat dengan pesawat dari Jakarta, transit di Singapura dan akhirnya sampai di Yugoslavia. Ketika ia berada di Slovenia ia sempat menuju

ke kantor Duta Besar Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Soepardjo. Ada hal yang aneh dilihat ketika berada di kantor itu. Masalahnya adalah, bahwa yang tergantung di dinding tempat duduk Duta Besar semestinya terpajang foto Soekarno, di sebelahnya seharusnya ada Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Namun foto-foto itu tidak ada, sehingga hal ini memunculkan pertanyaan di pikirannya, seolah-olah pada saat kedatangannya pertama di sana sudah menunjukkan ada suasana politik yang berbeda dari pada yang semestinya (Jorghensen, 2015: 24).

Ada beberapa masalah yang menyebabkan Dewa Soeradjana tertekan, karena Duta Besar itu menanyakan berbagai pertanyaan tentang dirinya mengapa sampai berada di negeri asing itu. Dewa Soeradjana tidak kembali ke tanah air tahun 1965 atau pada tahun 1967, karena ia mengetahui bahwa adik laki-laknya sudah diincar oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sejak tahun 1965 (Jorghensen, 2015: 35). Tampaknya ia tidak menerima kelakuan kelompok KAMI yang dianggapnya "sebuah kelompok rezim yang bengis yang menyerang hanya karena adiknya adalah pendukung Soekarno".

Selanjutnya apa yang ditanyakan secara terus menerus terhadap dirinya dianggapnya sebagai sebuah upaya interograsi karena diceritakan, bahwa ia dikatakan harus meninggalkan negeri asing itu dan kembali ke tanah air, karena tugas pendidikannya sudah diselesaikan pada 19 Oktober 1965 (Jorghensen, 2015: 34--35). Dari apa yang dikisahkan ini tampaknya pembaca memperoleh interpretasi, bahwa telah terjadi perubahan peta politik nasional dan internasional terhadap apa yang akan terjadi di Jakarta pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Didasari atas kisah ini tampaknya apa yang disampaikan ini dapat memberikan kontribusi pada dinamika sejarah politik Indonesia terutama ketika Soekarno diceritakan sudah menuju masa-masa keruntuhannya.

Model penulisan karya Jorghensen ini dapat dipertimbangkan sebagai model penulisan historiografi komunisme di tingkat regional. Tampaknya tidak hanya Dewa Soeradjana yang mengalami pengalaman seperti itu, dan masih banyak tokoh-tokoh lain tampaknya memiliki pengalaman serupa yang hendaknya dapat dituliskan pengalamannya, sehingga dapat melengkapi karya historiografi komunisme yaitu menjelang terjadinya peristiwa tahun 1965 itu.

Kondisi politik yang tidak menentu menyebabkan perubahan suasana di kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri yang dikenal dengan nama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). PPI dikatakan sudah lemah dalam menghadapi rezim Soeharto sebelum mereka kembali ke tanah air. Tampaknya para mahasiswa pun berhati-hati dalam mengungkapkan sesuatu, karena kalau tidak diinterpretasikan sebagai sikap melawan rezim Soeharto (Jorghensen, 2015: 38). Yang menarik adalah bahwa pada tahun 1966 dicatat terjadinya penglengseran terhadap semua staf kedutaan dan posisi mereka diganti oleh orang-orang Soeharto. Demikian pula kalau semula

ada pendeklarasian untuk mendukung Soekarno pada pertemuan PPI, namun akhirnya berubah untuk mendukung Soeharto. Adapun alasannya, karena mengingat masalah keluarga mereka yang ada di Indonesia jika tidak memberikan dukungan pada Soeharto. Interpretasi Dewa Soeradjana muncul, bahwa semua perubahan itu disebabkan oleh peran Soeharto sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

"...setelah selesai melancarkan serangan perburuan para pengikut Soekarno dalam KAMI, apakah Soeharto merasa selayaknya seorang pahlawan karena mampu memaksa para mahasiswa untuk membanting haluan dari sayap kiri ke kanan, dibandingkan menarik pendukung dengan cara yang dia ciptakan. Persis seperti cara yang telah ditunjukkan Soekarno (Jorghensen, 201: 39).

Menurut Soeradjana tampak, bahwa mahasiswa berkeinginan agar Soekarno tetap bertahan, namun kenyataannya setelah didengar berita pembantaian pada tanggal 1 Oktober 1965 itu suasananya menjadi semakin tidak menentu. Tahun 1967, Dewa Soeradjana telah menyelesaikan pendidikan masternya, dan segera mengajukan untuk dapat menempuh sekolah lanjutan, karena ia akan diberikan beasiswa untuk menyelesaikan program Ph.D-nya. Kenyataan menjadi berbeda, ketika Minister Councillor menolaknya dan diharuskan segera kembali ke Indonesia tanpa adanya penundaan. Interogasi itu dilakukan oleh konselor dan atase militer yang dianggapnya merupakan interpretasi lanjutan dalam melihat seberapa jauh keterlibatan pihak militer dalam kaitannya dengan peristiwa G. 30 S itu (Jorghensen, 2015: 45).

Karya Peer Holm Jorgensen memusatkan pembahasannya tentang bagaimana sebuah peristiwa sejarah yang penuh pembantaian di masa tahun 1965 itu dapat dilacak kembali ke episode-episode sebelumnya yang justru tidak terjadi di mana peristiwa pembantaian itu berlangsung, tetapi awalnya dapat dilacak permulaannya yang terjadi di luar wilayah itu. Apa yang disampaikan ini akan melengkapi pemahaman perjalanan sejarah Indonesia dalam kisah 1965 secara internasional dan regional. Dalam konteks ini, bagaimana pun pemahaman kita peran PKI memiliki arti signifikan dalam studi regionalisme seperti pemahaman tentang nasionalisme Asia misalnya. Bahkan, Wertheim dalam bukunya *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial* (1999: 268) menegaskan, bahwa:

"secara menyeluruh komunisme lebih mungkin ditemukan pada sisi nasionalisme di Asia, dibandingkan dengan sisi yang berlawanan, sementara kapitalisme mudah bermain dalam regionalisme dan propinsionalisme, sebagaimana telah terjadi selama satu abad".

Di sini tampak, bahwa dalam lingkungan regional Asia menunjukkan adanya potensi komunis yang dapat merekat nasionalisme Asia dan nasionalisme di Asia Tenggara pada khususnya. Ini dapat dimengerti karena pada umumnya pendukung komunisme adalah kelompok pekerja yang tampaknya semakin meningkat dalam konteks proses integrasi regional karena memiliki kesamaan-kesamaan budaya.

Itulah sebabnya di masa lalu gerakan komunisme ini diwaspadai dan diantisipasi di beberapa negara di Asia Tenggara (cf. Tran Khan An, 2016: 91, lihat juga: Falyey, 2015: 1). Akan tetapi, komunisme yang menurut pendapat Mortimer (1974) menegaskan, bahwa dalam sejarahnya komunisme di Indonesia ditakdirkan untuk konsisten dengan tragedi atau dengan kekerasan. Ini adalah berbeda dengan apa yang terjadi di Vietnam misalnya, karena kemenangan komunisme di sana, maka Vietnam yang terpecah antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, pada akhirnya dapat disatukan dengan kemenangan Vietnam Utara yang komunis pada tahun 1975 (Feske, 1999: 541). Di Indonesia, komunisme yang diidentikkan dengan kekerasan itu dianggap menjadi salah satu alasan mengapa komunisme dianggap gagal memainkan perannya di Indonesia. Namun demikian, dengan jatuhnya komunisme di Indonesia, maka sebagaimana dijelaskan oleh Afif Muhammad (2013) yang mengutip pendapat Samuel Huntington dalam karyanya yang berjudul, *Clash of Civilization* yang menyebutkan, bahwa jatuhnya komunisme itu menyebabkan pertikaian antara Barat dengan Komunisme akan digantikan dan dilanjutkan dengan pertikaian antara kekuatan Barat dengan Islam.

Dalam karyanya Jorghensen (2015) yang menganalisis jatuhnya komunisme di Indonesia juga berupaya memperoleh informasinya dari skop yang lebih luas atau internasional dan regional sebagaimana tampak, mewawancarai seorang putra kelahiran Bali yang menetap di Russia, dimana ia dianggap memiliki pengalaman di dunia internasional, ketika menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.

Bagaimana kemudian dalam konteks lokal lainnya yang tidak terekam dalam historiografi Indonesia selama ini? Untuk kawasan Nusa Tenggara dan sekitarnya pembahasan tentang gerakan komunisme dalam era kolonial Belanda dapat dibaca, I Ketut Ardhana (2000). Untuk Bali, memang belum banyak kajian tentang historiografi komunisme ini dilakukan. Namun paling tidak, pada masa Orde Baru sebenarnya sudah ada karya awal yang dilakukan oleh Geoffrey Robinson untuk menerbitkan karyanya yang berjudul, *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali* (1995). Dari karya Geoffrey Robinson inilah dapat dipahami, bagaimana peristiwa tahun 1965 itu tidak hanya menjadikan tokoh elit sebagai korban, tetapi orang kecil menjadi korban dan yang masih hidup masih merasakan bagaimana traumanya ketika berlangsungnya peristiwa itu.

Dari tulisan Geoffrey Robinson yang terbit tahun 1988 itu telah menstimulasi terhadap munculnya berbagai karya historiografi komunisme yang berupaya memberikan informasi penyeimbang terhadap karya-karya historiografi agama dan historiografi nasionalis. Karya Taufik Abdullah (2012b) khususnya tentang Bali yang ditulis oleh I Ketut Ardhana dan Wirawan, “‘Neraka Dunia’ di Pulau Dewata”, mencoba melihat secara umum terjadinya gerakan komunisme di tingkat lokal.

Riak-riak di Tingkat Lokal dan Konektivitasnya: Jawa Timur dan Bali

Apa yang terjadi di Bali tidak terlepas dari peristiwa yang mendahuluinya sebagaimana terjadi di Jawa Timur. Hermawan Sulistyó (2000) yang menulis tentang *Palu Parit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (1965—1966)* dapat dijadikan referensi, ketika terjadinya peristiwa pembantaian massal di wilayah Jawa Timur. Akan tetapi, dibandingkan dengan peristiwa di Jawa Timur ini, tampaknya korban yang berjatuh lebih banyak di Bali. Ada anggapan, bahwa jatuhnya korban yang banyak itu disebabkan oleh adanya tuduhan-tuduhan, bahwa bagi mereka yang terlibat sebagai pendukung dan simpatisan PKI dianggap akan menghancurkan adat dan agama di Bali. Isu keagamaan yang diangkat ini tampaknya memberikan respons signifikan terhadap para lawan politiknya itu. Lalu, dimana kaitannya antara peristiwa di Jawa Timur dengan peristiwa yang terjadi di Bali itu?

Meskipun gerakan komunis dikenal sebagai gerakan G30 S (Gerakan 30 September) karena peristiwa penculikan para jenderal yang dilakukan oleh PKI di Jakarta dilakukan, dan tidak terdengar jelas sampai ke Bali. Seperti dinyatakan oleh Vickers (1989: 185) sebagai berikut:

"In the long term the disaster of 1963 and the anti-Communist slaughter of 1965-6 were only temporary setback to tourism on Bali. Since most of the coverage of the coup and its aftermath was centred on Jakarta, there was little in newspaper reporting to directly associate the destruction of Communism in Indonesia with Bali."

Di Bali, hanya terdengar, bahwa akan ada kudeta Dewan Jenderal (Ardhana, 2012: 387). Pada saat itu, diketahui bahwa Soekarno selaku presiden tidak memberikan instruksi apapun mengenai tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, Sarwo Edhie mengambil tindakan penumpasan dan dianggap sebagai tindakan pembantaian terhadap anggota PKI dan ormas-ormasnya di Bali (Ardhana, 2012: 387). Aksi pembantaian di Denpasar dilaksanakan oleh RPKAD yang dikenal dengan pasukan Gagak Hitam. Disebutkan bahwa pasukan Gagak Hitam ini dibantu oleh Anshor yang merupakan bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk melakukan pembantaian terhadap mereka yang memiliki indikasi sebagai pendukung PKI.

Di Jembrana-Bali, rakyat menyebutkannya dengan G 30 N (Gerakan 30 November). M. Ikranegara dalam tulisannya "G 30 N di Bali" menyebutkan, bahwa gerakan itu rencananya dilakukan pada 30 November 1965 (Ardhana, 1985: 97). Sebagaimana diketahui, bahwa komunitas Islam di Jembrana sudah lama berakar dalam sejarahnya. Bahkan, telah mengakar dengan adat yang menunjukkan sikap toleransi dengan sesama komunitas Hindu. Ini misalnya dapat dilihat sebagaimana

dicatat oleh Dhurorudin Marshad (2014: 154) yang menekankan pengaruh pemurnian (*purify*) berlangsung di masa-masa berikutnya (lihat juga: Peacock, 1978):

"Sampai sebelum tahun 1965, bahkan kaum muslim ikut bergabung dalam upacara Pura Majapahit, meskipun sekadar untuk penghormatan. Agar keberadaannya tidak nganggur dan bengong, umat Islam dilibatkan dengan mekidung yakni: Kidung Renggonis (dari Jawa). Sedangkan umat Hindu berme-Kidung Worgasari. Namun, seiring dengan merembesnya kesadaran purifikasi Islam termasuk pada komunitas muslim Banyubiru ini, maka mereka tidak lagi terlibat dalam persembahyangan."

Dari kutipan di atas menunjukkan, bagaimana kebersamaan itu dapat pudar, jika partisan PKI menguasai desa Banyubiru di Jembrana. Ini tentu ada pengaruhnya terhadap komunitas Muslim yang ada di sana terhadap semakin meningkatnya aksi-aksi yang dilakukan PKI. Di Jembrana aksi-aksi gerakan sudah dilakukan jauh sebelum 30 September 1965 dengan alasan perlombaan dalam gerakan partai. Puncak dari aksi-aksi PKI adalah dengan diadakannya pembukaan hutan secara sepihak di Jembrana, terutama setelah memperoleh tenaga militan dari Anak Agung Dhinia yang beberapa tahun berada di Peking, Tiongkok (Ardhana, 1985: 98). Ini artinya bahwa berbeda dengan penjelasan dimana Dewa Soeradjana banyak mengisahkan pengalamannya di Russia (Jorghensen, 2015), maka penggalian informasi tentang apa yang terjadi sekitar tahun 1960-an di Tiongkok tampaknya penting untuk dikaji lebih lanjut.

Untuk hubungan antara Bali dengan Jawa Timur dalam kaitannya dengan terjadinya pembantaian, tampaknya pada awal November 1965 sudah diketahui (Ardhana dan Wirawan, 2012: 383). Konflik antar golongan berlangsung di Jawa Timur dan Bali hingga pertengahan November 1965 (cf. Cribb, 2003). Ada hal yang menarik untuk diungkapkan tentang bagaimana konflik berlangsung antara yang kontra dan pendukung PKI, misalnya di Jombang di Jawa Timur. Kisah-kisah lisan menyebutkan bahwa banyak para seniman, guru yang sebenarnya mereka tidak menjadi pengikut PKI ditangkap. Mereka yang ikut sebagai seniman tari misalnya dalam sebuah pertunjukkan mengakui bahwa mereka bukanlah anggota PKI, tetapi hanya membantu temannya yang kebetulan ikut menari di sebuah acara pertunjukkan. Demikian pula halnya dengan guru-guru yang mengikuti sebuah aktifitas kegiatan mengakui juga tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk mendukung PKI, akan tetapi tiba-tiba mereka ditahan. Sampai sekarang jika mereka ditanyakan ternyata tidak mengetahui kesalahannya, mengapa mereka dituduh terlibat sebagai pendukung PKI.

Ada anggapan, bahwa Abdurachman Wahid yang merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama dari pesantren Tebuireng yaitu Kyai Haji Hasyim Asyari di Jombang mati-matian membela PKI, karena merasa berdosa (Ardhana, 2012:

387). Tampaknya peristiwa di Jombang dan sekitarnya banyak dapat diperoleh dari cerita lisan masyarakat yang sudah memiliki usia senja. Seperti di Kediri misalnya banyak yang dituduh simpatisan PKI jika melarikan diri dari kepungan tentara atau penumpas gerakan komunis di wilayah itu, maka para simpatisan itu akan melarikan diri dan masuk ke daerah-daerah Kristen di Kediri. Di wilayah Kristen ini mereka tampak berhasil dilindungi dan diselamatkan dari kejaran dan penangkapan yang akan dilakukan. Memang peristiwa di Kediri ini misalnya telah menimbulkan kesan yang membekas di ingatan kolektif masyarakatnya.

Demikian misalnya sampai sekarang dapat disaksikan adanya sebuah kuburan di Kecamatan Wates di Kabupaten Kediri Jawa Timur, dimana antara kuburan umum dan kuburan para simpatisan PKI dipisahkan oleh tembok dalam satu lokasi yang sama (Radita Novipuspitasari, 2016). Ini menunjukkan, bagaimana perilaku masyarakat pada masa itu yang memandang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh simpatisan PKI dianggap tidak biadab dan akhirnya kuburan mereka pun dipisahkan dari kuburan massal pada umumnya. Peristiwa di Jombang dan Kediri di Jawa Timur ini memang tampak berbeda dengan apa yang terjadi di Bali. Apa yang terjadi di Jawa Timur itu tampaknya masih jauh dari mainstream sejarah Indonesia selama ini.

Disebutkan, bahwa ada relasi yang kuat antara yang kontra PKI di Jawa Timur dan di Bali. Anshor sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama misalnya menumpang pasukan "Gagak Hitam" masuk dari Jombang menuju ke Bali yang tergabung dengan pasukannya Sarwo Edhie dalam kaitannya dengan pembrantasai PKI di Bali. Sebelum pembunuhan dari para jenderal di Jakarta, memang di Bali tidak ada persiapan di masyarakat. Dicatat, bahwa hal-hal tragis justru berlangsung setelah terjadinya pembunuhan jenderal tersebut. Antara berbagai pihak yang bertikai tampak kemudian saling mempersiapkan diri dan kecurigaan yang meningkat di kalangan mereka. Upaya-upaya mengikis habis simpatisan PKI pun semakin gencar dilakukannya. Kegiatan penangkapan yang dilakukan di Bali dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 10 November 1965 terutama terhadap tokoh-tokoh PKI di Denpasar di sebuah gudang dekat Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Jumlah tahanan yang ditangkap saat itu berjumlah 1800 orang (Ardhana, 2012: 388).

Di Bali, juga dimunculkan wacana, bahwa yang membunuh simpatisan PKI adalah bukan dari PNI. Alasannya adalah bahwa di Bali partainya memang berbeda, tetapi persoalan pembantaian dan pembunuhan lebih banyak dikaitkan dengan masalah keluarga (hasil wawancara dengan Bagus Sugiharto pada tanggal 11 Januari 2004, lihat lebih lanjut: Ardhana, 2012: 387). Akan tetapi perlu dicatat, bahwa pasukan RPKAD di bawah komando Sarwo Edhie yang datang ke Bali menyebabkan semakin meningkatnya aksi pembunuhan. Pada waktu itu yang menjadi panglima adalah Sjaefuddin yang berasal dari Jember di Jawa Timur. Beberapa tentara RPKAD berasal dari Madura. Di antara pasukan RPKAD itu adalah dari suku Jawa yang bukan berasal dari Bali. Dapat diduga, mereka berasal dari Jawa Timur. Sesudah itu,

baru kemudian tentara yang berasal dari etnis Bali masuk ke Bali, yang sebelumnya mereka kebanyakan ditugaskan di Sumbawa Besar dan Bima.

Sebagaimana yang terjadi di wilayah Kediri di Jawa Timur, dimana komunitas Kristen menyelamatkan orang-orang yang dituduh PKI untuk tidak ditangkap dan dibunuh, maka demikian pula yang terjadi di Bali. Di Bali, banyak orang Katholik yang menyelamatkan oknum PKI, yang dianggap adanya instruksi dari Kardinal Darmoyuwono. Di Bali, diperkirakan dibunuh 100.000 orang yang dibuang ke sungai dan dimakamkan di pemakaman umum (Vickers, 1989: 172). Sementara itu, orang-orang yang diduga oknum PKI itupun dipersulit di komunitas mereka yang dikenal dengan *banjar* sebagai sebuah unit terkecil dari struktur masyarakat Bali. Demikian pula di tempat-tempat ibadah seperti *pura*, karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak bermanfaat. Masyarakat Bali beranggapan bahwa siapa saja yang merusak persatuan *banjar* dan siapa yang menodai agama tidak layak hidup dan harus mati. Inilah yang menjadi salah satu sebab, mengapa korban Gerakan 30 S di Bali begitu banya, dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia (lebih lanjut lihat: Fact Finding Commission: Komando Operasi Tertinggi. Jakarta, 10 Januari 1966, cf. Ardhana, 2012: 389).

Simpulan

Upaya penulisan historiografi komunisme ini dalam kaitannya dengan sejarah Indonesia, diharapkan paling tidak, sudah memunculkan kesadaran bagaimana kekosongan pembahasan masalah komunisme dalam dinamika sejarah Indonesia sudah mulai dilakukan. Dibandingkan dengan historiografi nasional dan historiografi agama, tampaknya historiografi komunisme dalam konteks sejarah Indonesia masih jauh dari pembahasannya yang komprehensif.

Perlu dilihat dari perspektif internasional atau regional yang mengitari peristiwa yang terjadi tahun 1965 itu. Karya Peer Holm Jorghensen mengenai "sejarah yang hilang" atau *the Missing History* tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah kurangnya data pembanding yang diberikan terhadap argumen-argumen yang menyebutkan, bahwa peristiwa itu juga hendaknya dilihat dari apa yang terjadi di Jakarta, Amerika Serikat, Russia, Tiongkok termasuk perlunya data-data dari pihak tentara, sumber-sumber arsip dari komponen Islam, pemuda, dan sebagainya. Adanya keterbatasan sumber-sumber sejarah ini diharapkan akan dapat diperoleh data pembanding melalui sumber lisan baik melalui wawancara mendalam sehingga bahan yang cukup untuk menganalisis peristiwa-peristiwa sebelumnya, pada saat dan setelah tahun 1965 itu.

Oleh karena itu, adanya suasana zaman yang berbeda dan memberikan ruang untuk menyampaikan kepada publik terhadap perspektif yang berbeda, diharapkan akan dapat mengisi kehilangan atau kevakuman sejarah yang terjadi yang dianggap

sebagai *the Missing History*. Oleh karena itu, meskipun isi buku ini memperkuat dugaan-dugaan keterlibatan Soeharto, tentara, yang didukung pihak Amerika di satu pihak, yang tampak memperkuat perspektif atau pandangan kelompok lawan terhadap yang terjadi itu. Namun demikian, masih tetap diperlukan kajian-kajian dan pembahasan yang mendalam dari sisi-sisi kontroversi lainnya, sehingga generasi sekarang dan yang akan datang memiliki khazanah sejarah tanah air, yaitu sejarah Indonesia yang menyeluruh dan komprehensif.

Selain itu, pandangan-pandangan dari peristiwa-peristiwa lokal seperti dalam kaitannya dengan wilayah terdekat seperti Jawa Timur dan Bali misalnya perlu dilihat konteks sejarahnya. Dengan kontribusi sumber-sumber lisan dalam konteks sejarah lokal, maka sumber-sumber sejarah regional dan internasional juga akan memberikan kontribusinya dalam upaya memahami secara lebih baik tentang apa yang terjadi berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September di Bali, Jawa Timur pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. Sukri Abdurrachman dan Restu Gunawan (eds.), 2012a. *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional*. Jilid I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Abdullah, Taufik. Sukri Abdurrachman dan Restu Gunawan (eds.), 2012b. *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional*. Jilid II. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Abdullah, Taufik dan A. B. Lopian yaitu, 2012c. *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid VII, "Pascarevolusi". Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Adam, Asvi Warman. 2000. "Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Sejarah Korban Indonesia", dalam P. Lim Pui Huen, James H. Morrison, Kwa Chong Guan (eds.). *Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode*. Jakarta: LP3ES.
- Afif, Muhammad. 2013. *Agama & Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja.
- Ardhana, I Ketut. 2015. "Menilik Kesaksian Seorang 'Pelaku Sejarah' Menjelang Peristiwa 30 September". Makalah dipresentasikan pada acara seminar/bedah buku yang ditulis oleh Peer Holm Jorgensen, *the Missing History: Berdasarkan Kisah Nyata Dewa Soeradjana*. Jakarta: Penerbit Noura Books, 2015, pp. 476. Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana bekerjasama dengan Bentara Budaya yang dilaksanakan di Gedung Bentara Budaya, Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra pada tanggal 21 November.
- Ardhana, I Ketut dan A. A. Bagus Wirawan, 2012. "'Neraka Dunia' di Pulau Dewata", dalam Taufik Abdullah, Restu Gunawan, Sukri Abdurrachman (eds.). *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional*. Jilid II. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915--1950*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ardhana, I Ketut. 2000. *Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonialherrschaft. 1915 bis 1950*. Passau: Richard Rothe.
- Ardhana, I Ketut. 1985. *Perkembangan Muhammadiyah di Bali, 1934—1968*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan-Universitas Gajah Mada.
- Blumberger, Petrus J. Th. 1931. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie*. Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon N/V.
- Blumberger, Petrus J. Th. 1934. *Politieke Partijen en Stroomingen in Nederlandsch-Indie*. Leiden: N. V. Leidesche Uitgeversmaatschappij.
- Cribb, Robert. 2003. *The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali, 1965—1966*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Dahm, Bernhard. 1966. *Sukarnos Kumpf um Indonesiens Unabhangigkeit*. Berlin/Frankfuhr am Main: Alfred Metzner Verlag.
- Dahm, Bernhard, 1971. *History of Indonesia in the Twentieth Century*. London: Pall Mall Press.
- Dhurorudin Marshad. 2014. *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fact Finding Commission: Komando Operasi Tertinggi. Jakarta, 10 Januari 1966.
- Falyey, Lindsay. 2015. *Understanding Southeast Asia: Syncretism in Commonalities*. Songkhla: TSU Press.
- Feske, Susanne. 1999. "Der ASEAN-Staatenbund", dalam Bernhard Dahm dan Roderich Ptak (eds.). *Sudostasien Handbuch: Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur*. Munchen: CH Beck.
- Ikranegara, M. 1966. "G 30 N di Bali", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 3, Tahun ke -38. Jogjakarta: PP Suara Muhammadiyah.
- Inglison. John. Iskandar Nugraha (ed.). 2004. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Jorgensen, Peer Holm, 2015. *The Missing History: Berdasarkan Kisah Nyata Dewa Soeradjana*. Jakarta: Penerbit Noura Books.
- Larrain, Jorge. 1979. *The Concept of Ideology*. London: Hutchinson University Library.
- McVey, Ruth T. 1965. *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca-New York: Cornell University Press.
- Mortimer, Rex. 2011. *Indonesian Communism under Soekarno: Ideologi dan Politik 1959—1965*. (Terj. Yudi Santoso). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Onghokham. 1978. "Sukarno: Mitos dan Realitas", dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (eds.). *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta:

LP3ES.

- Peacock, James L. *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. California: University of North Carolina at Chapel Hill.
- Radita Novi Puspitasari. Ni Wayan. 2016. *Modern Ideology and Traditional Religion under Sukarono*. Unpublished Master Thesis. Yekaterinburg, Russia: Ural Federal University.
- Reid, Anthony. 1974. *Indonesian National Revolution, 1945—1950*. Victoria: Longman Australia Pty. Ltd.
- Robinson, Geoffrey. 1995. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*. Cornell: Cornell University Press.
- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Parit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (1965—1966)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Tran Khan An, 2016. "Towards Asean Economic Community (AEC) 2015: Health Insurance for Migrant Workers in the Informal Sector", dalam Chayan Vaddhanaphuti (ed.). *Asean Connectivity*. Bangkok: the Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD).
- Vickers, Adrian. 1989. *Bali: A Paradise Created*. Australia: Periplus Editions.
- Wertheim, W. F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogya: PT Tiara Wacana.